

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Desa diperlukan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterahkan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun Pemerintahan Desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan Pemerintah Desa.

Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup> Pengaturan tentang Desa diatur pula dalam Pasal 371 dan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung Perubahan mendasar tentang Pemerintah Desa, maka dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang

---

<sup>1</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1.

Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Desa di mana BPD yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Dalam hal pelaksanaan pemerintahan, Desa mempunyai kewenangan, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Keberadaan suatu desa berdasarkan kewenangan sesuai Pasal 19 antara lain:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan.<sup>2</sup> Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, di mana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu,<sup>3</sup> yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa menurut Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah produk hukum tingkat desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai

---

<sup>2</sup>Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio Legal*, Jurusan Ilmu Pengetahuan FISIP UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 70-71.

<sup>3</sup>*Ibid.*,

badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).<sup>4</sup> Adapun fungsi BPD menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.<sup>5</sup> Musyawarah berbicara tentang proses sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tersebutlah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai peraturan desa di daerah tempat tinggal sekitarnya..

---

<sup>4</sup>Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media, 2007, hlm. 35.

<sup>5</sup>*Op.cit.*, hlm. 17.

Desa Puseurjaya yang merupakan tempat di mana dilakukannya penelitian skripsi ini merupakan desa yang bisa dikatakan cukup aktif dalam menjalankan pemerintahan desa, namun dalam menjalankan otonomi daerah yang berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku, Desa Puseurjaya masih belum bisa dikatakan maksimal dalam menjalankan pemerintahan desa, kurangnya kedekatan antara aparatur desa dengan masyarakat menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pemerintah desa Puseurjaya dalam menjalankan tugas serta fungsinya yang salah satunya yaitu penyalur suara serta aspirasi masyarakat. yang mana nantinya aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut bisa dijadikan dasar dalam pembentukan suatu program dalam Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD bersama Kepala Desa untuk mencapai persetujuan bersama.

Adapun Peraturan Desa yang dibentuk dalam periode 20014-2015 di Desa Puseurjaya ini hanya lima program. Disini terlihat fungsi dari desa Puseurjaya tersebut tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk terciptanya suatu aspirasi guna mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik atau biasa disebut dengan *Good Governance*. Peraturan Desa yang dibentuk dalam periode 2014-2015 di Desa Puseurjaya antara lain:

1. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes);
2. Peraturan Desa Nomor 141.1/III/Des/2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

3. Peraturan Desa Nomor 13.2/V/Des/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
4. Peraturan Desa Nomor 141.1/Kep-IV/Des/2015 tentang Pungutan dan Iuran Desa.

Jumlah Peraturan Desa tersebut di atas terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah Peraturan Desa di desa lainnya. Hal ini didasarkan pada hasil survei awal yang dilakukan oleh Penulis untuk membandingkan Peraturan Desa di Desa Puserjaya dengan di desa lain. Di sini Penulis membandingkan dengan Desa Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Pada Desa tersebut didapatkan hasil awal mengenai Peraturan Desa yang dibentuk selama periode 2014-2015 yang antara lain :

1. Peraturan Desa Nomor 900/Perdes/III/2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
2. Peraturan Desa Nomor 900/Perdes/IV/2014 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
3. Peraturan Desa Nomor 03/Perdes/VII/2014 tentang Program Kerja Tahunan Desa;
4. Peraturan Desa Nomor 04/Perdes/II/2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
5. Peraturan Desa Nomor 02/Perdes/IV/2015 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Desa Nomor 03/Perdes/IV/2015 tentang Program Kerja Tahunan Desa;

7. Peraturan Desa Nomor 03/Perdes/VIII/2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
8. Peraturan Desa Nomor 141/1/Desa/2015 tentang Pungutan Desa.

Dari hasil keterangan tersebut di atas maka dapat terlihat perbandingan antara Peraturan Desa yang dibentuk pada Desa Puseurjaya dengan yang ada di Desa Simabaya selama periode 2014-2015. Peraturan Desa di Desa Puseurjaya nyatanya lebih sedikit.

Berdasarkan atas permasalahan yang terjadi dan telah diuraikan di atas maka penulis merasa tertarik dan akan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul: **PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA PUSEURJAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2014-2015)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya?

3. Bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Puseurjaya terhadap kendala dalam proses pembentukan Peraturan Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya.
3. Untuk mengetahui upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam menghadapi kendala dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Puseurjaya.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Gagasan awal tentang sejarah negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles pada zaman Yunani Kuno 300 SM. Ia menyatakan bahwa yang memerintah negara adalah bukan manusia, melainkan fikiran yang adil. Ini artinya, keadilanlah yang memerintah dan keadilan harus terjelma dalam kehidupan bernegara. Aristoteles mensejajarkan hukum (keadilan) dengan akal (kecerdasan) dan bahkan bukan dewa, sehingga bagi siapa yang memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti pula telah memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah, berarti pula telah memberi tempat bagi binatang buas, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang dapat mendorongnya menjadi binatang buas dan menjadi makhluk yang paling rendah.



Dengan demikian hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hukumlah yang layak menjadi sumber kekuasaan dalam situasi negara. Ide negara hukum Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah “keadilan”. Hukum sebagai *ius, iustitia, recht*, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas bernilai “keadilan”. Jadi hukum itu pertama-tama berarti adil atau hukum karena adanya keadilan (*ius quia iustum*). Penekanan substansi hukum sebagai keadilan sangat penting untuk membedakannya dengan undang-undang (*we/law/lex*).<sup>6</sup>

Pembagian kekuasaan adalah masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dengan *Trias Politica*. Walaupun pada kenyataannya kepada kita, bahwa kekuasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada didalam satu tangan, karena dengan demikian akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu kekuasaan negara hukum dibagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan (*scheiding von macten*) yang lazim disebut kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dengan demikian pengertian bahwa untuk melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu terpisah satu sama lain, sehingga dengan demikian tidak ada campur tangan antara badan-badan itu dalam melaksanakan kekuasaannya masing-masing.

Dalam ketatanegaraan yang lazim melaksanakan kekuasaan legislatif adalah parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kekuasaan eksekutif ada pada Presiden beserta para Menteri, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Badan

---

<sup>6</sup>Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hlm. 23-24.

Kehakiman. Selanjutnya, bahwa didalam ajaran *Trias Politica* itu terdapat suasana *Check and Balance* di mana di dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.<sup>7</sup>

Namun dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu tangan, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter, sebut saja misalnya seperti dalam bentuk monarki di mana kekuasaan berada ditangan seorang raja. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian pemisahan kekuasaan sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan.<sup>8</sup>

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb.) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb.) menjadi beberapa bagian (legislatif,

---

<sup>7</sup>Moh. Kusnardi Bintar P. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 1978, hlm. 30-31.

<sup>8</sup><http://click-gtg.blogspot.com/2008/11/teori-pembagian-kekuasaan.html> diakses pada 27 Oktober 2015 pukul 20.30 WIB.

eksekutif, yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemuatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/lembaga.<sup>9</sup>

Seperti yang diterangkan di atas secara visual nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dua cara:

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*teritorial division of power*). Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara kesatuan negara federal serta konfederansi.
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal, pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan (*division of power*).<sup>10</sup>

Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu negara kesatuan atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 267.

Persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari sesuatu negara sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dan golongan-golongan yang berada dalam satu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal (yaitu dalam suatu negara konfederansi) atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal (yaitu dalam suatu negara kesatuan).<sup>11</sup>

Pembagian kekuasaan secara horizontal, seperti dimuka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungannya dengan doktrin. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru disebut *rulemaking function*). Kedua, eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru disebut *rule application function*). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru disebut *ruleadjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.<sup>12</sup>

Ajaran dari kaum monarkomaken terdiri atas, khususnya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana dari aliran hukum alam, tetapi yang terakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 281-282.

kepada masyarakat inilah para individu itu menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi, sesungguhnya raja itu mendapatkan kekuasaannya dari individu-individu tersebut.

Sekarang persoalannya timbul lagi, yaitu dari apakah individu-individu itu mendapatkan kekuasaannya? Sebab mereka ini harus mempunyai terlebih dahulu sebelum dapat memberikan kekuasaan itu kepada raja. Jawaban mereka ialah bahwa individu-individu tersebut mendapatkan kekuasaan itu dari hukum alam. Ingat disini yang dimaksud adalah hukum alam dari abad ke XVII dan abad ke XVIII, bukan hukum alam dari kaum monarkomaken tadi.

Jadi hukum alam inilah kalau begitu yang menjadi dasar daripada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum alam, dan oleh karena raja tadi mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka kalau demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, jadi yang berdaulat inilah adalah rakyat, raja itu hanya pelaksana dan apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Maka lalu timbul ide baru tentang kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat yang antara lain dipelopori atau malahan orang mengatakan diciptakan oleh J.J Rousseau. Yang ajarannya telah diuraikan pada waktu membicarakan ajaran hukum alam.

Perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengan rakyat oleh Roesseau itu bukanlah penjumlahan daripada individu-individu di dalam negara itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Roesseau kehendak tadi disebut

kehendak umum atau *volunte generale* yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Sebab kalau yang dimaksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan daripada individu-individu di dalam negara itu, jadi bukannya kekuasaan yang dibentuk oleh individu-individu itu maka kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau *volunte generale* melainkan *volunte de tous*.<sup>13</sup>

Teori Demokrasi Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Jimly Ashiddiqie demokrasi adalah “*Democracy means that the will which is represented in the legal order of the state is identical with the will of subjects*”, bahwa arti dari Demokrasi adalah kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak daripada subyek atau warga negara.<sup>14</sup> Menurut B. Mayo dalam bukunya Ni'matul Huda menyatakan bahwa demokrasi di dasari oleh beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercerminkan dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;

---

<sup>13</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

<sup>14</sup> Jimly Assiddiqie & Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2006. hlm. 78.

6. Menjamin tegaknya keadilan.<sup>15</sup>

Suatu pemerintah dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah: Persamaan, kebebasan, dan pluralism. Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl, terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi di antaranya: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.<sup>16</sup>

Teori Otonomi Daerah, otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>15</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012., hlm. 266-267.

<sup>16</sup>Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 147

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5-6. Intervensi dari pihak lain yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan (*unitarisme*), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, yang otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian sehingga urusan-urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.

Teori *Good Governance*, *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang



lebih pada warga, antara lain untuk memonitorakuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>17</sup>

*Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan istitusi non pemerintah ini dapat sajamemegang peran dominandalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun “*governance without government*” Praktik *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik.<sup>18</sup>

Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparasi, penegakkan hukum dan akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good gevernance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.<sup>19</sup>

Sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, pemerintahan yang dapat dikatakan baik itu berarti dilihat pada proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa

---

<sup>17</sup>Sumarto Hetifa, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 1-2.

<sup>18</sup>Samodra Wibawa, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 77.

<sup>19</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 20.

menghambat proses pembangunan. Pemerintahan juga dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Sumber data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah.

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari tahap-tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait, yaitu terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Desa.

---

<sup>20</sup>Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 216.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan yang didapat dengan cara mengakses situs *website* melalui internet.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan data primer pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## **3. Teknik Penelitian**

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, agar dapat mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Wawancara

Cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup> Dan dapat juga diartikan wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Teknik yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur dan bebas dengan menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**4. Analisis**

Untuk menganalisis, penulis memulai dari pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan dan penyusunan data. Pengolahan data merupakan kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan. Setelah diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Di mana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer, sekunder, maupun secara tersier yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan data tabel atau angka-angka hanya sebagai data pendukung.

---

<sup>21</sup>Ronny Hanitijio Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1994, hlm. 144.

## **5. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan sesuai permasalahan yang diangkat yaitu mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Maka untuk memperoleh data tersebut, dalam hal ini penulis memilih tempat penelitian di Kantor Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang.

